



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

RENJA 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

*(024)6921105, 6922349
dispendukcapil.kabsmg@gmail.com
Jl. Pemuda No. 7 Ungaran*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen kunci dalam perencanaan pembangunan ditingkat Perangkat Daerah. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 memiliki peran yang strategis dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan disektor kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen ini menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, serta mengintegrasikan peran serta masyarakat dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2026.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tahun 2026 menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan mandat dan fungsi organisasi. Renja PD merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 2026-2029. Melalui pendekatan ini, Renja bertujuan untuk menjadi instrumen yang tepat guna dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten

Semarang Tahun 2026 dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026. Dengan demikian, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 menjadi pedoman penting dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat tahun 2026.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang

- Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor).

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menyumbang pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Semarang yang lebih baik. Pembangunan daerah Kabupaten Semarang akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh suatu dokumen rencana pembangunan tahunan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia;
2. Untuk memperoleh program-program prioritas yang dapat dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang tahun 2026 sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta melalui forum Perangkat Daerah.

3. Sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2026;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini berisi kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan

perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah (yang mengarah pada pencapaian IKU/IKK Perangkat Daerah);

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tahun 2026.

BAB V : PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 10.234.214.000,- terdiri dari Belanja Operasi Rp 10.096.756.000,- dan Belanja Modal Rp. 137.458.000,- yang berasal dari sumber dana DAU. Evaluasi Pencapaian Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Realisasi Keuangan Tahun 2024

No	Uraian	Target Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024
	TOTAL BELANJA	9.823.882.000	10.234.214.000	9.737.967.115	95,15
A	Program Pendaftaran Penduduk	1.527.814.500	1.912.062.500	1.788.819.737	93,55
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.527.814.500	1.912.062.500	1.788.819.737	93,55
	Pendataan penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi kependudukan	49.459.000	49.459.000	48.245.488	97,55
	Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	907.740.000	1.288.010.000	1.169.034.000	90,76
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	526.449.500	530.427.500	528.961.749	99,72
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporab Peristiwa Kependudukan	44.166.000	44.166.000	42.578.500	96,41
B	Program Pencatatan Sipil	123.111.500	124.701.500	124.634.116	99,95
	Pelayanan Pencatatan Sipil	99.586.500	105.848.500	105.781.116	99,94
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Pristiwa Penting	47.419.500	49.009.500	48.955.116	99,89
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	52.167.000	56.839.000	56.826.000	99,98

No	Uraian	Target Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	23.525.000	18.853.000	18.853.000	100,00
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	23.525.000	18.853.000	18.853.000	100,00
C	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	599.810.000	602.462.000	592.423.882	98,33
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database kependudukan	137.095.000	139.747.000	132.307.232	94,68
	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	137.095.000	139.747.000	132.307.232	94,68
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	462.715.000	462.715.000	460.116.650	99,44
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	334.984.000	334.984.000	332.475.650	99,25
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	127.731.000	127.731.000	127.641.000	99,93
D	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	81.672.000	81.672.000	78.633.500	96,28
	Penyusunan Profil Kependudukan	81.672.000	81.672.000	78.633.500	96,28
	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	81.672.000	81.672.000	78.633.500	96,28
E	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7.491.474.000	7.513.316.000	7.153.455.880	95,21
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.063.000	23.063.000	23.051.430	99,95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.702.000	8.702.000	8.700.000	99,98

No	Uraian	Target Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.508.000	5.508.000	5.507.920	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.853.000	8.853.000	8.843.510	99,89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.430.432.000	6.460.219.000	6.173.897.837	95,57
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	6.386.532.000	6.416.319.000	6.131.228.447	95,56
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	43.900.000	43.900.000	42.669.390	97,20
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.500.000	19.275.000	19.275.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.500.000	19.275.000	19.275.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.042.000	258.602.000	231.875.600	89,67
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.175.000	126.195.000	105.590.100	83,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.867.000	132.407.000	126.285.500	95,38
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	369.839.000	341.907.000	300.810.543	87,98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000.000	56.170.000	49.641.500	88,38
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	192.046.000	157.586.811	82,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.839.000	93.691.000	93.582.232	99,88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.598.000	410.250.000	404.545.470	98,61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.524.500	96.850.500	93.774.480	96,82

No	Uraian	Target Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.654.000	192.654.000	190.798.600	99,04
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.419.500	58.745.500	58.691.116	99,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.000.000	62.000.000	61.281.274	98,84

Tabel 2.2
Evaluasi Pencapaian Renja Tahun 2024

No	Uraian	Indikator	Target 2024	Capaian Tahun 2024
A	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	99,91 Persen	99,66 Persen
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	74.750 Dokumen	85.497 Dokumen
1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen
1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	40.000 Dokumen	85.497 Dokumen
1.3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan
1.4	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan
B	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan Akta kematian	97,13 Persen	99,74 Persen

No	Uraian	Indikator	Target 2024	Capaian Tahun 2024
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan dokumen pencatatan sipil yang terselesaikan	22.200 Dokumen	25.764 Dokumen
3.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	22.200 Dokumen	25.764 Dokumen
3.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	6 Layanan
4	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah permohonan pelayanan dokumen pencatatan sipil	22.200 Dokumen	25.764 Dokumen
4.1	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan
C	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Database Kependudukan yang akurat	99,4 Persen	99,92 Persen
5	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Ganda dan Anomali yang terselesaikan	10.000 Data	912 Data
5.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah Disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem kependudukan informasi yang di kelola	14 Jenis	14 Jenis
6.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan
6.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen
6.3	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Dokumen
D	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Informasi Kependudukan	100 Persen	100 Persen
7	Penyusunan Profil Kependudukan	Jenis Data Kependudukan yang dipublikasi setiap tahun	3 Jenis	3 Jenis

No	Uraian	Indikator	Target 2024	Capaian Tahun 2024
7.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen

Evaluasi pencapaian Renja (Rencana Kerja) Tahun 2024 terdapat program kegiatan yang belum tercapai, yaitu program pendaftaran penduduk dengan indikator persentase cakupan kepemilikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Target yang ditetapkan di tahun 2024 untuk program tersebut adalah 99,91 persen dan realisasi akhir tahun 2024 tercapai 99,66%. Dari data yang didapat bahwa angka 0,25% merupakan target dari pemegang KTP pemula. Masih ada pemilih pemula atau berusia 17 tahun yang belum melakukan perekaman biometrik KTP-el

Langkah yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan jumlah kepemilikan KTPel yaitu melakukan Perekaman biometrik di sekolah-sekolah untuk menyisir wajib KTP baru yaitu penduduk yang berusia 17 tahun juga mereka yang berusia 16 tahun agar saat mereka berusia 17 tahun KTP-el sudah bisa langsung dicetak. Namun demikian dengan terbatasnya personil dan peralatan mobilitas perekaman KTPel, belum semua sekolah di kabupaten Semarang dapat didatangi untuk melaksanakan perekaman KTP-el.

Selain mengejar atas kepemilikan KTPel, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang juga melaksanakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aktivitas IKD dapat dilaksanakan baik di kantor pelayanan di kecamatan, MPP maupun di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain sebagai identitas digital, IKD juga dapat dimanfaatkan untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencapaian kinerja kegiatan akan menunjukkan sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dengan hasil sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	%
A	BELANJA OPERASI	10.096.756.000	9.602.687.115	95,11
1	Belanja Pegawai	6.429.759.000	6.143.788.447	95,55
2	Belanja Barang dan Jasa	3.666.997.000	3.458.898.668	94,33
B	BELANJA MODAL	137.458.000	135.280.000	98,42
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.458.000	135.280.000	98,42
2	belanja Modal Aset Tetap lainnya	0	0	0,00
	Jumlah Belanja A+B	10.234.214.000	9.737.967.115	95,15

Tahun 2024 realisasi belanja operasi sebesar Rp 9.602.687.115,- atau 95.11% dari total belanja operasi sebesar Rp. 10.096.756.000,-. Sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp. 135.280.000,- atau 98,42% dari total belanja modal sebesar Rp. 137.458.000,-. Untuk realisasi belanja Tahun 2024 mencapai 95.15% atau Rp. 9.737.967.115,- dari total belanja sebesar Rp. 10.234.241.000,-. Sisa anggaran merupakan efisiensi pengadaan barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta efisiensi belanja BBM dan TOL untuk perjalanan dinas.

2. Target dan Realisasi Program Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Adapun target dan realisasi kinerja urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Program Wajib
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024
A	Program Pendaftaran Penduduk	1.912.062.500	1.788.819.737	93,55
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.912.062.500	1.788.819.737	93,55

No	Uraian	Target	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024
	Pendataan penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi kependudukan	49.459.000	48.245.488	97,55
	Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.288.010.000	1.169.034.000	90,76
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	530.427.500	528.961.749	99,72
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporab Peristiwa Kependudukan	44.166.000	42.578.500	96,41
B	Program Pencatatan Sipil	124.701.500	124.634.116	99,95
	Pelayanan Pencatatan Sipil	105.848.500	105.781.116	99,94
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Pristiwa Penting	49.009.500	48.955.116	99,89
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	56.839.000	56.826.000	99,98
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	18.853.000	18.853.000	100,00
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	18.853.000	18.853.000	100,00
C	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	602.462.000	592.423.882	98,33
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database kependudukan	139.747.000	132.307.232	94,68
	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	139.747.000	132.307.232	94,68
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	462.715.000	460.116.650	99,44
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	334.984.000	332.475.650	99,25
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	127.731.000	127.641.000	99,93

No	Uraian	Target	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024
D	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	81.672.000	78.633.500	96,28
	Penyusunan Profil Kependudukan	81.672.000	78.633.500	96,28
	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	81.672.000	78.633.500	96,28

Dapat dilihat dalam tabel diatas Program Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari empat program, enam kegiatan dan sebelas sub kegiatan. Capaian program paling tinggi adalah pogram pencatatan Sipil sebesar 99.95 persen atau terealisasi sebesar Rp. 124.634.116,-. Sedangkan realisasi keuangan yang terendah adalah program pendaftaran penduduk sebesar 93.55 persen atau terealisasi sebesar Rp.1.788.819.737,-. Namun demikian realisasi rendah ini sesungguhnya merupakan efisiensi belanja pengadaan ribbon/film cetak KTPel/KIA yaitu sisa kontrak pengadaan melalui toko daring.

3. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja sesuai RPJMD/RKPD Tahun 2024

NO	URUSAN, INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET 2024	REALISASI SEMESTER I 2024	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependuduka	%	88,11	90,50	92,58	102,30
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendafrtan Penduduk	%	86,24	87,00	93,18	107,10
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	89,98	94,00	91,99	97,86

Dokumen Adminduk seperti Kartu Keluarga, KTPel, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh Penduduk Indonesia. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi

pemilikinya. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen Adminduk bermanfaat dalam melakukan pengadministrasian penduduk berdasar hak legalnya serta memperkuat database kependudukan dan pelayanan publik.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan. Capaian Indikator kinerja tujuan tahun 2024 adalah 92,58% dari target sebesar 90,50% atau tercapai 102,30% melebihi target. Cakupan kepemilikan dokumen adminduk di Kabupaten Semarang sampai dengan Tahun 2024 mencapai 92,58 persen lebih tinggi 35 dari Tahun 2023 mencapai 88,11 persen. Artinya 92,58 dari Penduduk Kabupaten Semarang atau 1.007.968 jiwa sudah memiliki dokumen Adminduk yang wajib dimiliki. Masih ada 7,42 persen penduduk Kabupaten Semarang yang belum memiliki dokumen kependudukan yang wajib dimiliki. Indikator kinerja tersebut telah mencapai target dengan kategori "Sangat Tinggi" yang menunjang tujuan 1 yaitu meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Akan tetapi jika di dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2024 terhadap target tahun 2026 yaitu 99,54 persen belum mencapai 100 persen dan belum memenuhi target yang di tetapkan.

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk tahun 2024 adalah 93,18 persen dari target yang ditetapkan sebesar 87,00% atau tercapai 107,10% melebihi target. Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk sampai dengan Tahun 2024 mencapai 93,18 persen lebih tinggi dari Tahun 2023 yang hanya mencapai 85,00 persen. Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari 3 (tiga) kategori dari bidang pendaftaran penduduk yaitu kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan KTP-el dan kepemilikan KIA. Dari tiga kategori tersebut sudah memenuhi target salah satunya adalah kepemilikan KTPel yaitu mencapai 99,99 persen atau 819.983 jiwa yang memiliki KTPel dari jumlah wajib KTPel sebesar 819.991 jiwa. Indikator kinerja ini telah mencapai target dengan

kategori "Sangat Tinggi". Persentase capaian tahun 2024 terhadap target tahun 2026 mencapai 103,53 persen telah mencapai target yang ditentukan.

Capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah 91,99% dari target yang ditetapkan sebesar 94,00% atau tercapai 97,86%. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil sampai dengan Tahun 2024 mencapai 91,99 persen lebih tinggi 2,01 persen dari Tahun 2023 yang mencapai 89.98 persen. terdiri dari 4 (empat) kategori dari bidang pencatatan sipil yaitu kepemilikan akta kelahiran (0-18) tahun, kepemilikan akta kematian, kepemilikan akta perkawinan dan kepemilikan akta perceraian. Dari kategori tersebut yang menyebabkan persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil rendah adalah penerbitan akta perkawinan yang hanya mencapai 76,31% atau 429.148 yang memiliki akta perkawinan dari jumlah perkawinan yaitu 36 562.356. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2024 terhadap target tahun 2026 mencapai 95,82 persen belum mencapai target yang ditentukan.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

No	SASARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah (Perangkat KTP Elektronik)	Sudah	Sudah	Laporan Terlampir
2	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3 (tiga) Mitra	1 (Satu) Mitra	Perjanjian Terlampir
3	Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi yang berasal dari Data kependudukan yang telah Di Konsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Ada	Tidak Ada	Menjadi Kewenangan Provinsi
4	Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Inovasi pelayanan Bidang Administrasi		
	a. Kecepatan Layanan		1 Hari	

No	SASARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
	b. Jenis Inovasi		3 Jenis	1. Desa #GISA (Dafduk dan Capil) 2. Selayang Pandang (Dafduk dan Capil) 3. Simbalaputradewa (Capil)
	c. Jumlah Inovasi		3	1. Desa #GISA 2. Selayang Pandang 3. Simbalaputradewa
	d. Inovasi pelayanan terbaru pada semester I Tahun 2024		3	Data Terlampir
5	Terlaksananya Penerapan Zona Integritas (ZI)	Sudah	Sudah melaksanakan	SK Terlampir

Adapun penyebab Keberhasilan (faktor pendukung) dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Semarang yaitu :

1. Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan (Desa #GISA)
2. Pelayanan Adminduk secara daring melalui Sipendukonline.go.id;
3. Pelayanan Keliling (Jemput Bola) baik perekaman, pelayanan pendaftaran penduduk maupun pelayanan pencatatan sipil;
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten);
5. Pelayanan Adminduk di MPP
6. Pelayanan Akta Kelahiran bekerjasama dengan rumah sakit dan klinik bersalin;
7. Kerjasama dengan OPD, lembaga dan instansi lain dalam pemanfaatan data kependudukan.

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan (faktor penghambat) adalah :

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Masih ada masyarakat yang tidak peduli akan keamanan, kebenaran dan keakuratan data kependudukannya.
3. Belum Maksimalnya penduduk Kabupaten Semarang dalam memanfaatkan teknologi, khususnya ponsel baik untuk mengurus kepemilikan dokumen kependudukan maupun untuk memperoleh informasi mengenai administrasi kependudukan.

4. Pemanfaatan dokumen kependudukan seperti KTP dan KIA belum banyak dipersyaratkan dalam dunia usaha oleh pihak swasta, sehingga Perjanjian Kerja Sama dengan DispendukCapil belum optimal.
5. Belum optimalnya kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama perihal data pencatatan perkawinan dan perceraian.
6. Belum adanya insentif bagi petugas registrasi desa/kelurahan dalam membantu pelayanan Adminduk di desa/kelurahan.
7. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan adminduk.

2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dispendukcapil adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang, maka dapat ditetapkan isu strategis Dispendukcapil Kabupaten Semarang yaitu :

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang berkewajiban untuk memberikan identitas dan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk Kabupaten Semarang tanpa adanya diskriminasi.
2. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
Pemanfaatan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional sebagai isu utama, serta pemanfaatan dokumen kependudukan bukan hanya sebagai identitas namun juga untuk berbagai kepentingan.
3. Reformasi Birokrasi (Pelayanan Publik).
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan memerlukan strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang baik dari *performance pelayanan* maupun keakuratan data kependudukan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Konsep administrasi kependudukan mencakup pengertian dokumen kependudukan adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang penduduk dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya.

Partisipasi bantuan infrastruktur wilayah dari Pemerintah yang lebih tinggi, Perguruan Tinggi, pihak swasta menjadi prioritas pendampingan masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Program-program yang mendukung konsep tersebut adalah program penataan administrasi kependudukan. Tabel yang menyajikan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
 TAHUN 2026**

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
I	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	Kabupaten Semarang	99,95%	1.562.667.000	I	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Semarang	32 % 80 %	1.468.363.000
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	Kabupaten Semarang	75.250 dok	1.539.702.000		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	Kabupaten Semarang	155.020 dok	1.394.908.000
	Sub Kegiatan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Semarang	2 dok	48.750.000		Sub Kegiatan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Semarang	2 dok	26.669.000
	Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Semarang	150.000 dok	923.973.000		Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Semarang	150.000 dok	923.973.000
	Sub kegiatan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kabupaten Semarang	3 orang	50.706.000		Sub kegiatan Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kabupaten Semarang	3 orang	15.862.000

RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Semarang	1 laporan	475.617.000		Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Semarang	1 laporan	401.078.000
	Sub kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Kabupaten Semarang	1 laporan	40.856.000		Sub kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Kabupaten Semarang	1 laporan	27.326.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran penduduk	Kabupaten Semarang	19 kegiatan	22.965.000		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran penduduk	Kabupaten Semarang	7 kegiatan	73.455.000
	Sub kegiatan sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Kabupaten Semarang	1 laporan	22.965.000		Sub kegiatan sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Kabupaten Semarang	1 laporan	73.455.000
II	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Kabupaten Semarang	98,88%	503.150.000	II	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Kabupaten Semarang	100,00%	139.356.000
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan dokumen pencatatan sipil yang terselesaikan	Kabupaten Semarang	22.400 dok	283.808.000		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan dokumen pencatatan sipil yang terselesaikan	Kabupaten Semarang	22.512 dok	79.908.000

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Semarang	22.400 dok	91.369.000		Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Semarang	22.400 dok	32.519.000
	Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kabupaten Semarang	6 layanan	192.439.000		Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kabupaten Semarang	6 layanan	47.389.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah permohonan pelayanan dokumen pencatatan sipil	Kabupaten Semarang	22.500 dok	219.342.000		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan digitalisasi data yang Dilaksanakan	Kabupaten Semarang	2 kegiatan	59.448.000
	Sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kabupaten Semarang	1 laporan	32.416.000		Sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kabupaten Semarang	1 laporan	18.765.000
	Sub kegiatan Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Kabupaten Semarang	1 laporan	186.926.000		Sub kegiatan Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Kabupaten Semarang	1 laporan	40.683.000
III	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan yang akurat	Kabupaten Semarang	99,60%	2.943.637.000	III	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Kabupaten Semarang	92,00%	2.105.405.750

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah data ganda dan anomali yang terselesaikan	Kabupaten Semarang	8.000 data	123.674.000		Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Kabupaten Semarang	44 Unit	116.294.000
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Kabupaten Semarang	1 dok	123.674.000		Sub kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Kabupaten Semarang	1 dok	116.294.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi kependudukan yang dikelola	Kabupaten Semarang	14 jenis	2.819.963.000		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi kependudukan yang dikelola	Kabupaten Semarang	14 jenis	1.989.111.750
	Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kabupaten Semarang	2 laporan	2.442.541.000		Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kabupaten Semarang	2 laporan	1.855.482.750
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Kabupaten Semarang	2 dok	172.820.000		Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Kabupaten Semarang	10 dok	110.839.000
	Sub kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Semarang	1 laporan	204.602.000		Sub kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Semarang	1 laporan	22.790.000

Hasil Analisis Kebutuhan											
RKPD											
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
IV	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Informasi Kependudukan jenis data kependudukan yang dipublikasikan setiap tahun	Kabupaten Semarang	100,00%	88.503.000	IV	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan jenis data kependudukan yang dipublikasikan setiap tahun	Kabupaten Semarang	100,00%	68.250.000
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan		Kabupaten Semarang	3 jenis	88.503.000		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan		Kabupaten Semarang	3 jenis	68.250.000
	Sub kegiatan Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Kabupaten Semarang	3 dok	88.503.000		Sub kegiatan Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Kabupaten Semarang	3 dok	68.250.000
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	8.270.837.000	V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Nilai SKM	Kabupaten Semarang	79,63 89,00	7.891.672.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen penatausahaan perangkat daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	135.219.000		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen penatausahaan perangkat daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	31.272.000
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	5 dok	28.494.000		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	5 dok	17.496.000

Hasil Analisis Kebutuhan											
RKPD											
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Semarang	5 laporan	16.400.000		Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Semarang	5 laporan	5.073.000
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	4 laporan	90.325.000		Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	4 laporan	8.703.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	6.936.811.500		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	7.023.999.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Semarang	80 org/bin	6.891.561.500		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Semarang	69 org/bin	6.991.067.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Semarang	12 dok	45.250.000		Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Semarang	12 dok	32.932.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengembangan SDM pelayanan administrasi kependudukan	Kabupaten Semarang	100,00%	80.250.000		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengembangan SDM pelayanan administrasi kependudukan	Kabupaten Semarang	100,00%	4.238.000
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Semarang	1 paket	40.000.000		Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Semarang	1 paket	0

Hasil Analisis Kebutuhan											
RKPD											
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasar tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Semarang	5 orang	40.250.000		Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasar tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Semarang	5 orang	4.238.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	360.321.500		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	289.166.000
	Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Semarang	1 paket	150.485.000		Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Semarang	1 paket	55.000.000
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Semarang	1 paket	118.526.000		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Semarang	1 paket	118.526.000
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Semarang	12 laporan	91.310.500		Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Semarang	12 laporan	115.640.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penatausahaan Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	135.846.000		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penatausahaan Perangkat Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	5.274.000
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kabupaten Semarang	2 unit	95.596.000		Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kabupaten Semarang	2 unit	0

RKP										Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Semarang	20 unit	40.250.000		Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Semarang	20 unit	5.274.000			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran	Kabupaten Semarang	100,00%	330.951.000		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran	Kabupaten Semarang	100,00%	299.697.000			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	Kabupaten Semarang	12 laporan	49.701.000		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	Kabupaten Semarang	12 laporan	49.126.000			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik yang disediakan	Kabupaten Semarang	12 laporan	191.000.000		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik yang disediakan	Kabupaten Semarang	12 laporan	160.321.000			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kabupaten Semarang	12 laporan	90.250.000		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kabupaten Semarang	12 laporan	90.250.000			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	291.438.000		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Semarang	100,00%	238.026.000			

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kabupaten Semarang	10 unit	118.000.000		Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kabupaten Semarang	10 unit	84.297.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Semarang	2 unit	59.938.000		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Semarang	2 unit	65.000.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Semarang	2 unit	44.000.000		Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Semarang	2 unit	38.755.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Semarang	10 unit	69.500.000		Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Semarang	10 unit	49.974.000
		JUMLAH			13.368.794.000			JUMLAH			11.673.046.750

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan usulan masyarakat terkait program dan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dijangkau melalui Musrenbang, bahwa atensi masyarakat cukup besar terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta perubahan regulasi kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat juga menuntut pelayanan Administrasi Kependudukan yang murah dan mudah dijangkau. Hal tersebut ditanggapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengkomodir pelayanan dengan mendekatkan kepada masyarakat baik secara online melalui sipendukonline.go.id dengan membuka seluruh layanan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil serta validasi data kependudukan.

Bagi penduduk yang tidak dapat memanfaatkan pelayanan online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengoptimalkan peran Desa #GISA, dimana masyarakat cukup datang ke Desa/kelurahan setempat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukannya. Selain itu pelaksanaan jemput bola baik ke desa, rumah sakit maupun sampai rumah-rumah untuk menjangkau penduduk rentan adminduk.

Untuk meningkatkan kemampuan petugas registrasi dalam melayani masyarakat didesanya, secara rutin setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Bimtek Petugas Registrasi dengan maksud meningkatkan kemampuan dan pengetahuan terhadap regulasi-regulasi baru maupun update/penambahan aplikasi yang ada untuk proses pelayanan adminduk di desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Dalam perumusan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tahun 2026 akan disajikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam rangka perumusan prioritas dan sasaran perumusan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana diuraikan berikut ini

3.1.1 Isu Strategis Tahun 2025-2029

Kelompok makro isu strategis RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul;
- b. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan ketahanan keluarga;
- c. Daya saing pemuda, seni dan budaya;
- d. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kemandirian pangan yang berdayasaing;
- e. Kemiskinan;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka;
- g. Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah;
- h. Kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan adalah "Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah"

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 dalam RPJMD

Tema pembangunan daerah Tahun 2026 diarahkan pada "Pemantapan Masyarakat Kabupaten Semarang yang BERDIKARI" yang diprioritaskan pada:

1. Pemantapan sumber daya manusia yang unggul, dengan fokus:
 - a. Pemantapan kualitas layanan pendidikan;
 - b. Intensifikasi pendataan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - c. Penataan dan pemerataan tenaga pendidik;
2. Pemantapan kualitas layanan kesehatan. Pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan, dengan fokus:
 - a. Meningkatkan pengendalian inflasi melalui ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif;
 - b. Peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan pangan lokal;
 - c. Peningkatan koperasi aktif;
 - d. Peningkatan pembinaan pelaku usaha mikro untuk mengurus perizinan;
 - e. Peningkatan pelayanan prima, sosialisasi dan fasilitasi terkait Online Single Submission (OSS) dan Mall Pelayanan Publik (MPP);
 - f. Pengembangan pelayanan pariwisata (digitalisasi layanan pariwisata);
 - g. Pengembangan atraksi (daya tarik wisata);
 - h. Peningkatan akses sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - i. Penguatan jejaring dan kapasitas kelembagaan pariwisata;
 - j. Modernisasi sarana dan prasarana pertanian, penanganan pasca panen dan pemulihan lahan pertanian;
 - k. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian;
 - l. Promosi, jejaring dan kerjasama perdagangan;
 - m. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - n. Digitalisasi UKM yang terintegrasi antar sektor dari hulu hingga ke hilir;

- o. Sinergitas investasi kawasan peruntukan industri dan tenaga kerja;
 - p. Pemenuhan akses, sarana dan prasarana menuju kawasan peruntukan industri serta penyusunan rencana induk pembangunan industry kabupaten;
 - q. Pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, pengembangan perikanan tangkap yang ramah lingkungan, pengembangan pengolahan produk dan pemasaran perikanan;
 - r. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - s. Penurunan angka pengangguran terbuka.
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan fokus:
- a. Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi;
 - b. Penguatan kapasitas fiskal daerah;
 - c. Peningkatan kemandirian desa;
 - d. Penguatan implementasi Perencanaan kinerja berbasis risiko;
 - e. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi daerah;
 - f. Peningkatan konduktivitas wilayah.
4. Pemantapan pemerataan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas, dengan fokus:
- a. Optimalisasi infrastruktur di bidang pekerjaan umum;
 - b. Penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c. Peningkatan kolaborasi pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan rumah;
 - d. Peningkatan jumlah rambu Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - e. Peningkatan pengawasan kendaraan laik jalan;
 - f. Peningkatan manajemen lalu lintas;
 - g. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah;

- h. Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
5. Pemantapan keluarga sejahtera, peran perempuan dan pemenuhan hak anak, dengan fokus:
 - a. Peningkatan ketahanan keluarga berbasis gender dan penurunan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Peningkatan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak.
 6. Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Pengawasan terhadap pencemaran;
 - b. Peningkatan fasilitas pengolahan limbah;
 - c. Kebijakan pengelolaan limbah.
 7. Pemantapan pemuda berprestasi, kemandirian seni dan budaya lokal, dengan fokus:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta pembinaan terhadap atlet;
 - b. Peningkatan kapasitas organisasi pemuda;
 - c. Peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2026 adalah sebagai upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026, yaitu:

1. Indek Pembangunan Manusia sebesar 76,37;
2. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,90 - 5,90 persen;
3. PDRB perkapita sebesar Rp 61.150.000,00;
4. Kemiskinan sebesar 6,68 - 6,55 persen;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,71-3,41 persen;
6. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,59 (B);
7. Rata-rata ketercapaian kinerja pemenuhan sarana prasarana wilayah sebesar 87,45 persen;
8. Angka Kriminalitas sebesar 2,03 persen;

9. Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,65;
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,59;
11. Peningkatan prestasi bidang pemuda, olah raga dan seni budaya sebesar 78,52 persen;
12. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,00.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mendukung Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang nomor (3) "Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"

3.1.3 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Recana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN Tahun 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" dan menjadi landasan awal dalam mewujudkan delapan (8) Prioritas Nasional (PN) sesuai dengan Asta Cita. Tema dan prioritas nasional tersebut direfleksikan dalam sasaran utama RKP Tahun 2026 yang dirancang guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional sekaligus mendorong percepatan transformasi Penekanan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 terdiri atas 5 (lima) direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh Prioritas Nasional. Lima (5) direktif Presiden, yaitu:

1. Pengelolaan sampah;
2. Sekolah rakyat;
3. Digitalisasi pendidikan;

4. Percepatan pengentasan kemiskinan;
5. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sedangkan 8 (delapan) Prioritas Nasional meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Nasional Tahun 2026 fokus kepada program kedaulatan pangan dan energi, yang di dalamnya mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan (food estate), peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, hingga pengelolaan sampah. Prioritas lainnya yakni ekonomi yang produktif dan inklusif di dalamnya mencakup: program pendidikan dan kesehatan; deregulasi dan kepastian hukum; pertahanan semesta; percepatan pertumbuhan ekonomi; adopsi teknologi dan inovasi; percepatan pengentasan kemiskinan; serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional nomer (7) “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”

3.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yaitu “Penguatan perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis”. Tema pembangunan daerah tersebut dirumuskan dan dijabarkan dalam prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita dan mewujudkan tujuan daerah untuk menuju “Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari”, melalui prioritas daerah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mendukung prioritas pembangunan ke-4 yaitu "Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif"

3.1.5 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2026

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Semarang dalam RPJMD, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026, dan Tema RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 memberikan penekanan terhadap arah kebijakan pembangunan yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Semarang pada tahun 2026. Prioritas pembangunan dan fokus pembangunan Kabupaten Semarang yang didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 3.1
Hasil Perumusan Prioritas RKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026

Isu Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 dalam RPJMD	Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2026	Prioritas Provinsi JawaTengah 2026	Prioritas RKPD Kabupaten Semarang 2026	Prioritas RKPD Disdukcapil
Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi	<p>Misi 3</p> <p>Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggungjawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional</p>	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<p>a. Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Penguatan Kapasitas fiskal daerah</p> <p>c. Peningkatan Kemandirian Desa</p> <p>d. Penguatan implementasi Perencanaan kinerja berbasis risiko</p> <p>e. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi daerah</p> <p>f. Peningkatan kondusivitas wilayah</p>	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<p>a. Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan,</p> <p>b. Peningkatan Sosialisasi Adminduk secara masif melalui berbagai media,</p> <p>c. Peningkatan jumlah pengguna pemanfaatan data kependudukan,</p> <p>d. Peningkatkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan,</p> <p>e. Peningkatan Kompetensi SDM,</p>

Tabel 3.2

**Penjabaran Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang Tahun 2026**

Prioritas RKPD TA 2026	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
Pemantapan tata kelola reformasi birokrasi yang adaptif dan kolaboratif. a. Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan, b. Peningkatan Sosialisasi Adminduk secara masif melalui berbagai media, c. Peningkatan jumlah OPD/lembaga pengguna pemanfaatan data kependudukan, d. Peningkatkan inovasi pelayanan administrasi, e. Peningkatan Kompetensi SDM,	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen	32,00
		2. Persenyase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	persen	80,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	persen	100
		2. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	persen	100
		3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	persen	100
		4. Persentas Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	persen	92
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	persen	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP		79,64
		Nilai SKM		89

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati terpilih yaitu **Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kestuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika** dengan 7 misi yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, termasuk dalam misi ke-3:

“Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional.”

Rumusan tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien”**

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, adalah Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025
Tujuan : Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk	Kategori Kinerja	Kinerja tinggi (89,00%)
Sasaran 1: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen	94,67
Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah	Nilai SKM	Nilai	79,63

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 menggunakan nomenklatur Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka dilaksanakan melalui 5 program, 14 kegiatan, dan 33 sub kegiatan.

Tabel 3.4
Target Kinerja 2026

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2026
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	32,00
	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	80,00
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terselesaikan	Dokumen	155.020

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2026
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Edukasi tentang Pendaftaran Penduduk yang Dilaksanakan	Kegiatan	7
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00
	2. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00
	3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00
	4. Persentas Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil yang Terselesaikan	Dokumen	22.512
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Edukasi tentang Pencatatan Sipil dan digitalisasi data yang Dilaksanakan	Kegiatan	2,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	92,00
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Unit	44
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Layanan Administrasi Kependudukan	Layanan	31
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100,00
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	Dokumen	1

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Nilai	79,63
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persen	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengembangan SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Persen	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran	Persen	100,00
Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00

Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
			2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
			3 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
			4 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		5 Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	
		2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	3 Pelayanan Pencatatan Sipil	7 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting
			8 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
		4 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	9 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
			10 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5 Pengumpulan data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	11 Pengolahan dan penyajian data kependudukan
		6 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Fasilitasi terkait Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			13 Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan
			14 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	7 Penyusunan Profil Kependudukan	15 Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			18 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		9 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			20 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		10 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		11 Administrasi Umum Perangkat Daerah	22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			23 Penyediaan bahan logistik kantor
			24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		12 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			26 Pengadaan Sarpras dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		13 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Penyediaan jasa surat menyurat
			28 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			29 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		14 Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Pemerintah daerah	30 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			31 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
			32 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
			33 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2026

Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2026 untuk sumber dana APBD Kabupaten Semarang yaitu Rp. 13.368.794.000,- yang terdiri dari 5 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bergasarkankan Tugas dan fungsi.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pendaftaran Penduduk, dengan fokus kegiatan pada:
- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
 - 1) Pendataan penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi kependudukan;
 - 2) Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
 - 3) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
 - 4) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 5) Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporab Peristiwa Kependudukan.
 - b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
 - 1) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk.
3. Program Pencatatan Sipil, dengan fokus kegiatan pada:
- a. Pelayanan Pencatatan Sipil,
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Pristiwa Penting;
 - 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1) Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil;
 - 2) Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan fokus kegiatan pada:
- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - 1) Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan;
 - 2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan fokus kegiatan pada:

a. Penyusunan Profil Kependudukan

1) Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.

Rencana tersebut pada Tahun 2026 dapat dijabarkan pada Matrik Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2026 Kabupaten Semarang yang terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
DAERAH (RENJA OPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.673.046.750,00								14.600.878.500,00	
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.673.046.750,00								14.600.878.500,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP SKM				79,63 nilai 89,00 nilai	7.891.672.000,00							9.441.046.500,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Keterseediaan Dokumen Panatasausahaan Perangkat Daerah				100,00 %	31.272.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pegawai Dispendukcapil		135.219.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			17.496.000,00		Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DAVA BAGI HASIL (DBH)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pegawai Dispendukcapil		28.494.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			5.073.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		16.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			8.703.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		90.325.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00 %								7.810.537,00,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	6.991.067.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil	15	7.765.287.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	32.932.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		45.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAMUKA MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawain Peringkat Daerah	4 Terlaksananya Pengembangan SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			0,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		40.000.000, 00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang			4.238.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		40.250.000, 00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100,00 %	289.166.000,00		Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		360.921.50 0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	55.000.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		150.485.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	118.526.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		118.526.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	115.640.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		91.310.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Panatasausahaan Perangkat Daerah			100,00 %	5.274.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		432.330.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mem- perkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		392.080,00 0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5.274.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mem- perkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		40.250.000 00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.08		Persentase Pemerintah Jasa Penunjang Perkantoran				100,00 %	299.697.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, & nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		330.951,00 0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	49.126.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mem- perkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawai Dispendukcapil		49.701.000, 00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		14	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	160.321.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawal Dispendukcapil		191.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12	90.250.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawal Dispendukcapil		90.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00 %	238.026.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawal Dispendukcapil		291.438.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09.0009		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			84.297.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawal Dispendukcapil	118.000.000,00	15	16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			65.000.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawal Dispendukcapil	59.936.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit			38.755.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pegawal Dispendukcapil	44.000.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
								NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				150000 Dokumen	923.973.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang		923.973.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				3 Orang	15.862.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang		100.706.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	401.078.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang		475.617.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	27.326.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mem- perkuat penc- egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe- nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pem erintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang		47.656.000, 00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftraan Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Edukasi tentang Pendaftraan Penduduk yang Dilaksanakan				7 Kegiatan	73.455.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mem- perkuat penc- egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe- nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pem erintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		22.965.000, 00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftraan Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftraan Penduduk				1 Laporan	73.455.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke//Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mem- perkuat penc- egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe- nyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pem erintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		22.965.000, 00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPL	Persentase Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan				100 %	139.356.000,00							508.150.00 0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	DAERAH								
1	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil yang Tersesalkan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							22512 Dokumen	79.908.000,00	Kab. Semarang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		283.808.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				22400 Dokumen	32.519.000,00	Kab. Semarang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		91.369.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				6 Layanan	47.389.000,00	Kab. Semarang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		192.439.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Edukasi tentang Pencatatan Sipil dan digitalisasi data yang Dilaksanakan				2 Kegiatan	59.448.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		219.342.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / REGIARAN / SUB REGIARAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			1 Laporan	18.765.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pelanggaran lainnya	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintang ritas Dan Dinamistif Pemantapan Pengendalian Hidup dan Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Semarang	32.416.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.03.2.02.0011	Penyaljian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil			1 Laporan	40.683.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pelanggaran lainnya	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintang ritas Dan Dinamistif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang	186.926.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
4,	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perentase Informasi Kependudukan yang dimarfaatkan			92 %	2.105.405.750,00								2.943.637.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyaljian Database Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan			44 Unit	116.294.000,00								123.674.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyaljian Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi/kependudukan yang di kelola	-			14 jenis	1.989.111.750,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		123.674.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2	1.855.482.750,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		2.442.541.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				10	110.839.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		172.820.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1 Laporan	22.790.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Pemanipulan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang		204.602.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-			100,00 %	68.250.000,00						-	88.503.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	-			1 Dokumen	68.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Masyarakat Kabupaten Semarang		88.503.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				3 Dokumen	68.250.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, & penyeludupan	Pemanipulan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Masyarakat Kabupaten Semarang	88.503.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			J U M L A H					11.673.046.750,00							14.600.878.500,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026 melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan, pengajuan usulan program dan kegiatan ke forum MUSRENBANG, perumusan, penyusunan, verifikasi sampai dengan pengesahan dan penetapannya. Dalam proses ini terdapat banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki guna menuju kesempurnaan agar diperoleh kesesuaian dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya baik

a. Catatan Penting

Proses penyusunan I Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Peran serta stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum PD hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan


Penyusunan Rencana Kerja ini berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi ke depan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti. Didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang).

c. Rencana Tindak lanjut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang berupaya melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dapat bermanfaat dan membahagiakan masyarakat serta stakeholder yang membutuhkan data kependudukan. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang

berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Ungaran, 1 Agustus 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SEMARANG



TAJUDINOR, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720101 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pemuda Nomor 7, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921105, 6922349,

Laman www.dukcapil.semarangkab.go.id, Pos-el dukcapil@semarangkab.go.id

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 000.8.2.4 / 13 /2025

TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Rencana Kerja adalah dokumen SKPD tahunan Kabupaten Semarang yang merupakan acuan dalam Pembangunan Daerah, dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi kebijakan, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga dan daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2021);
 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan 1 (satu) Tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- KEDUA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 7 Maret 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SEMARANG,



Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 3. Inspektur Kabupaten Semarang;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR : 000.8.2.4 / 13 / 2025
 TANGGAL :
 TENTANG TIM PENYUSUNAN
 DOKUMEN RENCANA KERJA
 (RENJA) DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL TAHUN
 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TAJUDINOR, S.H.,M.M. NIP. 19720101 199203 1 011	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	SRI PRATIWININGSIH, S.H.,M.M NIP. 19811208 200501 2 012	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	DEVI ARI ISTANTI, S.Kom NIP.19811208 200501 2 012	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	PRIMA CAHYA ADI SULISTYOWATI, S.E. NIP. 19820908 201001 2 024	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	PADANG SETIARNO, S.Kom,MM NIP. 19830514 201101 1 008	Ketua Tim Kerja Bidang Identitas Penduduk Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	LIYA NOVITASARI, SE NIP. 19770114 199603 2 001	Ketua Tim Kerja Bidang Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	SITI CHALIMAH, SE,MM NIP. 19810225 200312 2 005	Ketua Tim Kerja Bidang Kelahiran dan Kematian Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	SRIYONO, SH NIP. 19720326 199403 1 004	Ketua Tim Kerja Bidang Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaran Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	RIFKI MANUWIJAYA, S.Kom NIP. 19780501 201001 1 017	Ketua Tim Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	OKI TRIYOGA WICAKSANA, S.Kom NIP. 19800418 200501 1 009	Ketua Tim Kerja Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	MARVIANA DWI LESTARI, S.Kom NIP. 19930312 202202 2 001	Administrator Database	Anggota
12.	NURUL UKHROWIYAH, SE NIP. 19920719 202521 2 027	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : UNGARAN
Pada Tanggal : 7 maret 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SEMARANG,

